

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan TI dan SI berdampak terhadap cara pandang organisasi dalam berbisnis karena perkembangannya semakin cepat dan terus bergerak. Fungsi TI dan SI saat ini telah menjadi faktor utama dalam mewujudkan tujuan organisasi, dimana fungsi SI dan TI hanya sebatas pendukung dalam proses bisnis. Akibat yang ditimbulkan dari perkembangan TI dan SI adalah proses bisnis lebih efektif dan efisien, efektif dalam menjalankan misi organisasi, efisien dalam penggunaan sumber daya (Muchtadi, 2013).

Pengembangan SI dalam organisasi didukung dengan penggunaan teknologi informasi (TI) dapat menjadi strategi dalam meningkatkan daya saing (Septiana, 2017). Tata kelola yang baik dapat menunjang penerapan SI TI dalam organisasi, agar pemanfaatannya efisien dan efektif guna mencapai visi misi organisasi, bahkan dinegara-negara maju telah memiliki dan menerapkan standar tata kelola SI TI untuk negaranya (Bahrawi, 2015). Pengembangan sebuah sistem informasi yang dilakukan secara sembarang, hanya mengakibatkan pemborosan sumber daya. Maka dari itu perlukan dilakukan sebuah perencanaan strategis sistem informasi (PSSI). Akibat lain tidak terselenggaranya PSSI bagi organisasi adalah pengembangan SI yang dilakukan secara sektoral berjalan tidak optimal atau bahkan gagal. Dampak terburuk yang dihadapi oleh organisasi yang tidak menerapkan PSSI adalah sebagai berikut.

1. SI TI yang dikembangkan bersifat sektoral. Pengembangan SI TI yang tidak dilakukan secara terpusat, sangat besar kemungkinannya berjalan tidak selaras dengan visi misi organisasi.
2. Kesempatan untuk memajukan organisasi hilang, ini dikarenakan SI TI yang dikembangkan secara spontan atau tanpa perencanaan dapat berakibat penurunan kualitas pelayanan.
3. Terjadi konflik kepentingan. Pengembangan SI TI yang sarat dengan kepentingan pribadi maupun golongan sangat merugikan organisasi, karena dapat menghamburkan sumber daya yang dimiliki.
4. Investasi SI TI tidak optimal. Tidak optimalnya investasi karena anggaran untuk SI TI dalam organisasi sangat kecil, sehingga hanya sedikit yang bisa diinvestasikan dalam bidang SI TI..

Pengembangan SI pada DISPUPR Provinsi Bali khususnya dan pemerintah daerah pada umumnya telah mendapat dukungan dari presiden dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, diharapkan dengan adanya Inpres tersebut pengembangan sistem informasi dapat berjalan optimal dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap infrastruktur dasar seperti yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi.

DISPUPR Provinsi Bali merupakan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang mempunyai wewenang, tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk dalam

melaksanakan otonomi daerah pada bidang pelayanan infrastruktur dasar. Didalam struktur organisasi DISPUPR Provinsi Bali terdiri dari 5 bidang, 3 UPTD dan sekretariat, yang memiliki tugas pokok yang berbeda-beda. Dengan banyaknya bidang dan UPTD yang ada, maka diperlukannya suatu SI guna mempermudah pengelolaan data dan monitoring pekerjaan demi tercapainya visi dan misi dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang didukung oleh DISPUPR Provinsi Bali. Kondisi saat ini DISPUPR Provinsi Bali memiliki beberapa masalah dalam bidang SI sebagai berikut.

1. Tidak adanya PSSI yang mendukung visi, misi dan program Gubernur Bali. Ini karena kurang sadarnya akan pentingnya suatu perencanaan strategis dalam bidang SI.
2. Belum memiliki SI yang terintegrasi. Sistem yang ada saat ini masih dibangun secara terpisah karena tidak adanya PSSI yang merencanakan dalam investasi SI.
3. Proses bisnis yang dilakukan masih *manual* sehingga mengakibatkan kualitas layanan terhadap masyarakat menjadi rendah. Dikatakan manual karena segala proses dalam pelayanan belum dilakukan digitalisasi, seperti pengajuan rekomendasi teknis dalam pemanfaatan infrastruktur daerah, masih menggunakan surat dalam bentuk fisik..
4. SI yang pernah dibangun sebelumnya tidak berumur panjang. Karena kurangnya perencanaan, SI yang dikembangkan hanya bersifat sementara serta dengan kinerja yang kurang, akibat dari pengembangan SI yang bersifat spontan.

5. Pemanfaatan sarana dan prasarana IT belum Optimal. Penggunaan sarana SI TI saat ini hanya sebatas untuk mengetik surat, menyimpan file dan mengolah data di excel.
6. Kurangnya ketersediaan SDM dalam bidang TI. DISPUPR Provinsi Bali adalah OPD yang bergerak dalam bidang infrastruktur, oleh karena itu SDM yang lebih dicari adalah lulusan teknik sipil, untuk lulusan dalam bidang TI masih belum diperhitungkan.
7. Investasi SI TI belum optimal, karena anggaran untuk bidang SI TI masih kecil, hal ini dapat dilihat dari masih digunakannya komputer yang berumur lebih dari 10 tahun.

Oleh karena itu dilakukan penelitian di DISPUPR Provinsi Bali untuk menanggulangi masalah tersebut, serta merencanakan PSSI yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kondisi yang diharapkan kedepannya adalah berjalannya proses bisnis yang berbasis SI TI yang berjalan selaras untuk mencapai visi misi dari Pemda Provinsi Bali.

Diperlukan perencanaan yang baik dalam pengembangan SI TI yang sesuai dengan melibatkan pihak-pihak terkait sehingga proses bisnis dapat berjalan sesuai dengan rencana (Pelawi, Willy, & Irwanza, 2011). Pengembangan SI harus selaras dengan strategi organisasi supaya fungsi SI dapat meningkat dan dapat meningkatkan daya saing oorganisasi (Iswara & Sucahyo, 2009). Metodologi Anita Cassidy menjadi dasar penelitian PSSI di DISPUPR Provinsi Bali. Pemilihan metodologi tersebut didasari atas keunggulan yang dimiliki dalam proses analisisnya, yaitu terdapat proses analisis *risk management* dan analisis *business*

case (untuk mengetahui Return of Investment). Adapun manfaat yang diperoleh setelah dibangunnya PSSI pada DISPUPR Provinsi Bali adalah dihasilkannya portofolio aplikasi yang dibutuhkan mendatang yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, investasi terhadap SI mendukung tujuan bisnis organisasi dan penerapan prioritas SI.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dihadapi oleh DISPUPR Provinsi Bali adalah bagaimana merencanakan pengembangan SI, agar selaras dengan visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Bali. Peneliti mencoba untuk mengangkat permasalahan PSSI, dengan studi kasus DISPUPR Provinsi Bali.

Seiring dengan berbagai perubahan kebijakan maupun perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku diikuti pula dengan perubahan peran dan fungsi sistem informasi, permasalahan yang ditemui pada DISPUPR Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

1. DISPUPR Provinsi Bali belum memiliki rencana strategis dalam bidang SI TI yang selaras dan dapat mendukung pencapaian visi misi dan program Gubernur Bali. Ini disebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya PSSI yang dapat menjadi pedoman dalam menyelaraskan kegiatan organisasi dengan visi misi kepala daerah.
2. Sistem informasi yang telah dibangun di DISPUPR Provinsi Bali masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi. Pengembangan sistem yang dilakukan

secara sektoral dapat berakibat susah terintegrasi dengan sistem yang ada pada bidang lain.

3. Sistem informasi yang pernah dibangun tidak berumur panjang. Pengembangan yang dilakukan secara spontan dan atas dasar egoisme semata tidak dapat bertahan lama karena kurangnya perencanaan dan pemahaman dalam SI yang dibangun.
4. Proses bisnis masih bersifat manual. Dikatakan manual karena dalam proses pelayanan seperti pelayanan rekomendasi teknis pemanfaatan infrastruktur masih menggunakan surat dalam bentuk fisik, sehingga lebih banyak memerlukan waktu.
5. Sarana dan prasarana TI yang belum dimanfaatkan secara optimal karena pemberdayaan belum optimalnya. Pemanfaatan SI sampai saat ini hanya sebatas mengetik surat, menyimpan data dan mengolah data dengan excel.
6. SDM yang tersedia dalam mendukung terselenggaranya SI/TI belum optimal. Kebutuhan SDM pada DISPUPR Provinsi Bali lebih ke bidang teknik, hal ini disebabkan karena tugas organisasi adalah membangun dan memelihara/merawat infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah..
7. Investasi SI TI yang dilakukan belum optimal. Kurangnya peremajaan perangkat SI TI.

1.3 Pembatasan Masalah

Supaya penelitian ini berjalan sesuai tujuan penelitian, oleh karena itu ditetapkan batasan masalah sebagai berikut.

1. Menyusun kerangka kerja berupa usulan portofolio sistem perencanaan strategis sistem informasi pada DISPUPR Provinsi Bali.
2. Perencanaan strategis sistem informasi pada DISPUPR Provinsi Bali tidak melibatkan analisis pada bidang keuangan.
3. Perencanaan strategis sistem informasi pada DISPUPR Provinsi Bali berpatokan pada Renstra DISPUPR Provinsi Bali yang telah disusun.
4. Analisis kebutuhan SI disesuaikan dengan kondisi kebutuhan saat ini.

1.4 Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah dari penelitian ini.

1. Bagaimana kondisi bisnis internal saat ini pada DISPUPR Provinsi Bali?
2. Bagaimana kondisi bisnis eksternal saat ini pada DISPUPR Provinsi Bali?
3. Bagaimana kondisi SI TI internal saat ini pada DISPUPR Provinsi Bali?
4. Bagaimana kondisi SI TI eksternal saat ini pada DISPUPR Provinsi Bali?
5. Bagaimana kesenjangan antara kondisi eksisting dengan target yang ingin dicapai?
6. Bagaimana rekomendasi (strategis SI, strategis TI dan manajemen SI dan TI) DISPUPR Provinsi Bali?
7. Bagaimana hasil validasi PSSI yang telah disusun?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah menyusun analisis internal dan eksternal lingkungan organisasi maupun lingkungan SI pada DISPUPR

Provinsi Bali, dan dapat diimplementasikan dalam sebuah perencanaan strategis sistem informasi. Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kondisi bisnis internal saat ini dari DISPUPR Provinsi Bali.
2. Untuk mengetahui kondisi bisnis eksternal saat ini dari DISPUPR Provinsi Bali.
3. Untuk mengetahui kondisi SI TI internal terkini dari DISPUPR Provinsi Bali.
4. Untuk mengetahui kondisi SI TI eksternal terkini dari DISPUPR Provinsi Bali.
5. Untuk mengetahui kesenjangan kondisi eksisting dengan target yang diharapkan.
6. Menghasilkan rekoemdasi atau saran untuk DISPUPR Provinsi Bali yang sesuai dengan kebutuhan.
7. Menguji rekomendasi yang sudah disusun.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dihasilkan dari PSSI ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Akademik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi yang dapat memperkaya pengetahuan dalam bidang PSSI, khususnya dengan memanfaatkan metodologi Anita Cassidy tersebut dalam melaksanakan PSSI di lingkungan pemerintahan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumbangan pemikiran bagi DISPUPR Provinsi Bali dan dapat digunakan sebagai referensi dalam upaya pemanfaatan dan pengelolaan SI yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan organisasi.

